

Pokok- Pokok Pikiran untuk Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Denpasar, 14-18 Juli 2003

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DALAM RANGKA PENINGKATAN
KEIMANAN DAN KETAKWAAN KEPADA TUHAN YME**

M. Din Syamsudin
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sekretaris Umum MUI Pusat

01. Sebenarnya judul di atas perlu dibalik menjadi peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME dalam rangka pembangunan berkelanjutan kerana frasa pertama, sebelum kata rangkai dalam rangka, dapat dipandang sebagai instrumen terhadap frasa kedua yang merupakan tujuan. Apalagi seyogyanya tidak hanya dijadikan “sasaran” (obyek) tapi “sarana” (subyek atau medium) pembangunan. Kesalahan selama ini terletak pada pemosisian agama sebagai obyek yang dibangun, tanpa menjadikannya sebagai kekuatan pembangunan manusia/masyarakat.
02. Hal ini mungkin berpangkal pada paradigma pembangunan yang terlalu menekan modernisasi, dalam arti pembaharuan infrastruktur kehidupan manusia, dan kurang berorientasi humanisasi yaitu pembangunan sebagai proses pemanusiaan manusia itu sendiri. Dengan mengabaikan humanisasi pembangunan kehilangan arah dan makna, dan berubah menjadi dehumanisasi, yang menimbulkan krisis kemanusiaan dan pada giliran berikutnya memunculkan berbagai krisis kehidupan manusia.
03. Gejala krisis kemanusiaan yang terjadi di dunia sejak paruhan kedua abad keduapuluh merupakan pangkal dari kerusakan global yang bersifat akumulatif (*accumulative global damage*) dalam bentuk krisis multidimensional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan moral. Karenanya, apa yang perlu dilakukan adalah perbaikan kerusakan dunia yang juga bersifat akumulatif (*accumulative*

global damage control). Hal ini perlu dilakukan dengan mengubah paradigma dunia dan pembangunan dunia ke arah penciptaan tatanan dunia baru melalui “pembangunan sehat berkelanjutan” (*sound and sustainable development*).

04. Dalam konteks pembangunan sehat berkelanjutan agama dapat difungsikan sebagai medium untuk membangun manusia sehat (jasmani dan rohani) yang kemudian dengan kekuatan kolektif bersama manusia-manusia lain dapat membangun lingkungan hidup kemanusiaan yang sehat pula. Muara dari proses pembangunan berkelanjutan adalah terwujudnya peradaban yang sehat diatas lingkungan hidup kemanusiaan yang sehat pula (kebetulan kata sehat yang berasal dari akar kata Arab “*sahha*” memiliki konotasi benar, baik dan kuat). Agama memiliki kekuatan pembenar, penyehat dan penyehat kehidupan, yaitu berfungsi antara lain sebagai: sumber motifasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi pembangunan. Dalam hal ini, agama membawa misi profetik, konstruktif dan menggugah manusia dan masyarakat untuk membangun dirinya; faktor yang dapat menyumbang nilai dan ide bagi pembangunan; dan alat ukur dan bahkan alat kritik untuk kebaikan proses pembangunan.
05. Fungsionalisasi agama sebagai subyek atau medium pembangunan menuntut peran negara untuk menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan agama dan keberagaman umat beragama yang positif dan konstruktif bagi pembangunan itu sendiri. Keberagaman yang diperlukan, dalam hal ini, adalah keberagaman yang bersifat etikal (agama ditampilkan oleh pemeluknya sebagai agama etik/*ethical religion*) yang melahirkan kesalehan sosial, bukan keberagaman yang bersifat ritualistic belaka (agama ditampilkan oleh pemeluknya sebagai agama etik/*ethical religion*) yang hanya melahirkan kesalehan individual jika keberagaman dan kesalehan pertama dapat melahirkan orang-orang baik tetapi kebaikan itu untuk dirinya sendiri, maka keberagaman dan kesalehan kedua melahirkan orang-orang baik yang menebarkan kebaikan bagi orang-orang lain. Keberagaman etikal dan kesalehan sosial merupakan hasil dari upaya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai etika, baik etika individual maupun sosial, yang mengejawantah antara lain dalam orientasi kepada kualitas kerja dan kinerja, kedisiplinan dan penghargaan akan waktu, daya saing dan keunggulan, serta

komitmen pada keselamatan bersama baik masyarakat dan negara (dalam ungkapan terbalik tidak mau merugikan orang lain, masyarakat dan negara seperti dalam perilaku koruptif).

06. Kesalehan sosial diperlukan bangsa Indonesia untuk membebaskan bangsa dari keterpurukan dan berbagai jeratan immorallitas, serta kemudian mendorong bangsa kepada kemajuan dan keunggulan. Modal sosial (*social capital*) bangsa untuk itu cukup besar, dan tidak dapat diingkari agama berperan besar bagi pembentukan modal sosial tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa keberagaman bangsa belum cukup mampu untuk mengkapitalisasi modal sosial yang ada guna mendorong baik keunggulan kompetitif maupun keunggulan dinamis bangsa. Bahkan terdapat ironi, ketika begitu banyak orang memenuhi rumah-rumah ibadat dan mengunjungi tanah-tanah suci, begitu banyak pula pelaku kejahatan dan kemungkaran dalam masyarakat. Akar dari ironi yang menampilkan ambivalen dan hipokrisis ini harus ditemukan untuk dijadikan dasar bagi penetapan kebijakan pembangunan dalam bidang keagamaan. Terdapat dua kemungkinan akar utama, yaitu pemahaman yang belum utuh tentang agama dan penciptaan lingkungan oleh sistem kekuasaan yang tidak kondusif bagi perkembangan pemahaman dan pengalaman agama itu sendiri. Negara sering tidak hadir bahkan, dalam banyak kesempatan, “menghalangi” pertumbuhan keberagaman yang etik yaitu ketika negara justru “mendorong” perkembangan kehidupan yang anti-agama.
07. Kebijakan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME perlu diarahkan kepada pembentukan akhlak (memang iman-takwa-akhlak terjalin dalam interrelasi integral), dalam pengetahuan yang seluas-luasnya, termasuk di dalamnya kecerdasan. Dua jalur strategis untuk itu adalah pendidikan dan dakwah keagamaan. Dalam hal ini, pendidikan perlu berorientasi pada pendidikan nilai (*value education*), yaitu pendidikan yang tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tapi juga nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan. Pendidikan agama perlu diubah dari praktik yang selama ini mengambil bentuk pengajaran dan terlalu berkuat pada pengembangan domain kognitif kepada penanaman dan pembentukan watak melalui pengembangan domain efektif

peserta didik. Begitu pula, dakwah keagamaan perlu mengkombinasi dan mengintegrasikan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan keagamaan dan penanaman nilai-nilai keimanan dengan pengembangan nilai-nilai akhlak dalam kedua dimensinya yaitu akhlak individual dan akhlak sosial tadi.

08. Umat beragama dengan penghayatan akhlak paripurna tadi akan menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan, berperan sebagai penyelesaian masalah/*problem solver*, bukan bagian dari masalah/*part of the problem*, dari pembangunan umat beragama seperti itu juga akan menjadi bagian dari masyarakat multikultur Indonesia, yang bersedia hidup berdampingan dengan damai bersama saudara-saudara sebangsa dan setanah air dalam budaya inklusifisme tapi penuh toleransi dan kerukunan sejati. Secara umum kehidupan sosial demikian relatif terjadi selama pembentukan bangsa, terutama karena adanya toleransi dari kelompok mayoritas agama dan penghargaan dari kelompok minoritas agama. Kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia pernah dijadikan model dan rujukan oleh masyarakat internasional, dan di banyak daerah di Indonesia kerukunan hidup memang tetap hidup. Namun, tidak perlu ditutup-tutupi bahwa potensi konflik tetap ada, dan kerukunan semu akibat menutup-nutupi masalah SARA dapat menjadikan bom waktu pertentangan dan perpecahan.
09. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan bidang agama dalam pengembangan hidup antar umat beragama perlu ditingkatkan baik kedalaman maupun keleluasaannya. Kerukunan hidup antar umat beragama perlu diarahkan kepada terwujudnya kerukunan sejati, bukan kerukunan basa-basi dalam bentuk keberbaikan semu di tingkat elit umat beragama, tetapi di tingkat akar rumput terjadi ketegangan karena adanya faktor-faktor konflik yang terabaikan. Diantara faktor-faktor ketidakrukunan itu adalah penyiaran agama, pendirian rumah ibadat, perkawinan beda agama, dan penerimaan bantuan asing, serta perebutan hegemoni dalam kehidupan politik dan ekonomi antara berbagai kelompok umat beragama yang tidak mengindahkan kode etik (faktor-faktor ini jika tidak dicegah tidak mustahil menimbulkan konflik antar umat beragama yang mengganggu integrasi nasional). Gejala fundamentalisme, eksklusifisme, komunalisme ekstrim dikalangan semua umat beragama (baik Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan

Buddha) berkembang karena faktor-faktor yang tidak bersifat teologis, tetapi sosial, ekonomi, dan politik. Kerukunan hidup antar umat beragama perlu di dorong dalam bentuk dialogis (*dialogical dialogue*) di antara umat beragama, yaitu dialog yang bertumpu atas kesejatian, ketulusan ketebukaan dan keseterusan.

10. Semua kebijakan dalam pembangunan bidang agama perlu memberi ruang yang seluas-luasnya kepada umat-umat beragama itu sendiri. Namun perlu juga diingat bahwa penyerahan kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di antara mereka sendiri, jika tidak tersedia toleransi yang memadai dan masih adanya kecenderungan merebut hegemoni, maka justru akan menimbulkan konflik. Dalam kaitan inilah, tanpa memasuki wilayah keyakinan keagamaan negara harus tampil berperan mengatur dan mengelola aspek sosial dari kehidupan antar umat beragama. Peran negara seperti ini adalah bukan intervensi, apalagi kekerasan negara (*state violence*), tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan kehidupan rakyat yang ada dimensi perbedaan dan potensial pertentangan. (Dalam Banyak teori politik, negara dibentuk untuk menjalankan hukum, dan masyarakat warga (*civil society*) adalah masyarakat yang walaupun mereka telah memberikan hak sekundernya kepada negara untuk menegakkan hukum dalam rangka mengatasi konflik yang mungkin timbul di antara mereka).
11. Memang, terdapat dua paradigma hubungan agama negara yang berkembang di kalangan umat-umat beragama di Indonesia, paling tidak di kalangan umat Islam dan kaum kristiani, yaitu: “Paradigma separatis” – bahwa ada pemisahan antara agama dan negara--menurut kaum Kristiani, yang oleh karena itu negara tidak boleh ikut campur atau melakukan intervensi dalam kehidupan umat beragama dalam bentuk apapun termasuk dalam produk hukum dan Perundang-undangan; dan “Paradigma integralisme” di kalangan umat Islam--- bahwa terdapat hubungan antara agama dan negara, yang oleh karena itu, negara perlu hadir mengatur dan mengelola kehidupan umat beragama. Dua paradigma yang berbeda ini harus dicari titik temunya, karena jika tidak akan selalu menjadi kontroversi. Sebenarnya, kontroversi ini tidak perlu terjadi jika semua pihak memahami watak dan posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

berdasarkan Pancasila, terutama dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Undang Undang Dasar 1945, terutama pasal 29, yang menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tetapi memberi tempat penting dan mementingkan agama. Dan, memang harus diakui bahwa agama mempunyai tempat terhormat itu adalah karena agama telah memberikan peran penting dan strategisnya, baik dalam perjuangan melawan penjajah maupun dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan. *Alla A'lam bi al-Sawab.*

M. Din Syamsuddin

ETIKA AGAMA

Dalam Membangun Masyarakat Madani

ETIKA-KEAGAMAAN UNTUK MASYARAKAT INDONESIA MODERN

Pengantar

Pembangunan Indonesia modern adalah agenda yang harus diwujudkan menghadapi tantangan masa depan. Kemodernan dan proses kemodernan merupakan keniscayaan historis yang tidak dapat dielakkan. Oleh karenanya, setiap bangsa dituntut dapat menghadapi dan mensiasatinya dengan menyiapkan sumberdaya manusia modern.

Pada hakikatnya, pembangunan ialah bagaimana upaya membuat penduduk suatu negeri (terutama kaum lemah dan kaum miskin) tidak hanya lebih produktif, tetapi juga secara sosial lebih efektif dan lebih sadar diri.¹ Bagaimana prosesnya, pembangunan memiliki dua unsur utama, yaitu sistematika dan dinamika pembangunan dalam hal ini merupakan proses sistematis yang dinamis (atau proses dinamis yang sistematis) menuju pencapaian tujuan.

Konsep pembangunan ini sejalan dengan dinamika sejarah dan dinamika peradaban manusia. Sejarah dan peradaban manusia berlangsung secara progresif menciptakan perkembangan dan kemajuan.

Proses Pembangunan Nasional yang tengah berlangsung dewasa ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia modern dimasa depan. Hal ini merupakan suatu kemungkinan, bahkan suatu keniscayaan. Maksudnya sebagai suatu bangsa yang besar dengan sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang besar, bangsa Indonesia sangat potensial untuk menjadi suatu bangsa modern di masa depan.

Indonesia modern adalah suatu cita-cita yang harus diwujudkan agar bangsa Indonesia bisa tampil berperan di dunia modern. Karena sebuah bangsa yang tidak mampu memodernisasi dirinya mengikuti arus kemodernan akan tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain, dan tidak mustahil akan terpelanting dari peta dunia modern.

Namun proses pembangunan sumber daya manusia yang menjadi fokus Pembangunan nasional masih menghadapi masalah dan kendala. Salah satu kendalanya adalah masih lemahnya kualitas pengalaman etos dan disiplin nasional

¹ Soedjatmoko *Pembangunan dan Kebebasan*, (LP#ES, Jakarta: 1984) hal.108

yang berorientasi pada nilai-nilai kemodernan. Hal ini ditunjukkan, umpamanya, dalam rendahnya penghargaan terhadap waktu, lemahnya penghayatan terhadap nilai kualitas dan prestasi, dan lemahnya penghayatan terhadap norma-norma hukum, hal ini erat kaitannya dengan persoalan etos budaya dan etos kerja manusia Indonesia yang secara umum lebih rendah bila dibandingkan dengan etos budaya dan etos kerja dinegara-negara Asia lainnya.²

Menghadapi tantangan dan kenyataan di atas, dapatkah agama berperan yaitu dengan menyumbangkan etik, moral dan spiritual? Tulisan ini mencoba menggali beberapa kemungkinan peran agama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia modern

Dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, agama mempunyai tempat yang terhormat Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk beragama dan memberikan kebebasan bagi para pemeluk agama-agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Hal demikian menunjukkan bahwa negara kita bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dan negara. Tetapi hal tersebut juga tidak berarti bahwa negara kita adalah negara teokratis, negara yang berdasarkan agama.

Posisi penting agama dalam negara Pancasila lebih lanjut dibuktikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN 1993), bahwa asas pertama dari Pembangunan Nasional adalah asas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan agama merupakan Landasan etik, moral dan spiritual bagi pembangunan.

Konsep di atas mengandung peluang sekaligus tantangan bagi umat beragama untuk mengaktualisasikan potensi etik dan moral serta spiritual agama untuk mendorong keberhasilan pembangunan.

Namun, persoalannya sekarang adalah bagaimana umat beragama dapat mengaktualisasikan potensi-potensi luhur dan agung itu ke dalam proses pembangunan, khususnya pembentukan kepribadian bangsa. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut meniscayakan adanya upaya kontekstualisasi nilai-nilai agama dalam dinamika pembangunan itu sendiri. Pembangunan, yang mengandung arti

² Uraian lebih rinci mengenai masalah budaya masyarakat dan etos kerja ini bisa dibaca dalam Loekman Soetrisno *Menuju Masyarakat Partisipatif* (Kanisius, Yogyakarta: 1995) hal.176-184.

perubahan dan pembaharuan, membawa terjadinya transformasi baik struktural maupun kultural dalam kehidupan masyarakat.

Agama memang sangat potensial untuk mendukung pembangunan, karena agama memiliki beberapa kemungkinan fungsi terhadap pembangunan. *Pertama*, agama merupakan sumber motivasi bagi pembangunan, yaitu faktor yang dapat mendorong dan menggugah manusia dan masyarakat untuk membangun.

Kedua, agama merupakan inspirasi bagi pembangunan, yaitu faktor yang dapat menyumbangkan nilai dan ide bagi pembangunan.

Ketiga, agama merupakan sumber evaluasi bagi pembangunan, yaitu bahwa agama dapat dijadikan sebagai alat ukur dan bahkan alat kritik untuk kebaikan proses pembangunan.

Pemanfaatan Etik-Keagamaan

Agama dapat dijadikan sebagai faktor pendamping dan pendukung (komplementer) terhadap proses pembangunan. Jika politik pembangunan dilangsungkan atas dasar Pancasila sebagai nilai-nilai dasar (*fundamental values*), maka agama, sebagai nilai-nilai yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat, dapat difungsikan sebagai nilai-nilai instrumental (*instrumental value*), yakni dengan mengembangkan etika dan moralitas keagamaan untuk dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang merupakan pelaku dan pelangsup pembangunan.

Umat beragama perlu tampil dengan spiritualitas kebaikan dan kebijakan. Spiritulitas ini merupakan dasar bagi terwujudnya kultur kebersamaan dan kerjasama. Oleh karena itu, aktualisasi dari spiritualitas ini perlu di tegakkan atas dasar etika tenggang rasa, *tepa selira*, dan saling pengertian.

Dalam perspektif di atas, terdapat kemungkinan pengait antara spiritualitas keagamaan dengan kebudayaan. Sebagai nilai-nilai yang melekat dalam penghayatan manusia nilai-nilai spiritual dapat menjadi landasan kebudayaan. Namun, proses ini menuntut adanya proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai spiritual itu terlebih dahulu ke dalam paradigma etik dan moral. Paradigma etik dan moral inilah yang akan

menjadi landasan kebudayaan: mencerahi, membimbing dan mengarahkan proses kebudayaan menuju perwujudan cita-cita kemodernan.

Perumusan konsep etika-keagamaan (*ethico-religious concept*) merupakan tantangan bagi para pemikir dan cendekiawan di kalangan umat beragama. Dalam hal ini komitmen keagamaan dan komitmen keilmuan umat beragama di tantang untuk mampu menghadirkan konsep etika-keagamaan yang dapat memperkuat perwujudan cita dan citra komodernan.

Dalam kaitan tersebut, pensenyawaan etika, moralitas, dan spiritualitas keagamaan ke dalam proses pembangunan merupakan pilihan dan alternatif terbaik terhadap kelebihan. Pendekatan terakhir yang bersifat simbolistik ini sering menjadi kendala yang menghalangi aktualisasi peran agama dalam proses perubahan sosial.

Agama-agama sangat kaya dengan nilai etika dan moral. Secara konseptual agama membawa paradigma etika dan moral untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Di antara etika keagamaan yang perlu di sumbangkan bagi perwujudan masyarakat Indonesia modern, adalah nilai-nilai yang mendorong terwujudnya tridimensi kemodernan, yaitu kemajuan, kemandirian dan keunggulan.

Seperti diajarkan agama, pencapaian tridimensi kemodernan diatas meniscayakan adanya beberapa orientasi hidup yang positif, dinamis dan progresif, yaitu (a) orientasi kepada perbuatan (*actioan oriented*), (b) orientasi kepada kualitas (*quality oriented*), (c) orientasi kepada tujuan (*goal oriented*), dan (d) orientasi kepada masa depan (*future oriented*).

Dalam perspektif etika-keagamaan, manusia dan masyarakat modern yang maju, mandiri, dan unggul adalah manusia atau masyarakat yang cenderung untuk merealisasikan segala cita-cita, rasa, dan karsanya ke dalam karya nyata, dan kemudian senantiasa cenderung untuk meningkatkan karya nyatanya itu menjadi karya terbaik atau prestasi, dalam proses dinamis dan sistematis untuk menghampiri cita-cita (tujuan) hidup, sebagai manifestasi dari penghadapan ke masa depan.

PERAN ETIKA DALAM PEMBANGUNAN

Pilihan untuk menjadikan kemandirian sebagai ide sentral pokok-pokok pikiran dalam Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai jalan mencapai tujuan pembangunan adalah tempat relevan, dan strategis. Hal ini dilihat, paling tidak, dari dua alasan utama. *Pertama*, proses pembangunan adalah proses yang berlangsung secara sistematis dan dinamis dalam suatu kesinambungan yang melahirkan perubahan (*continuity and change*). Untuk itu pembangunan perlu mempertahankan kesinambungannya dalam iklim yang sehat. Pembangunan yang sinambung dan sehat meniscayakan adanya partisipasi politik rakyat yang sejati dan besar, karena tanpa partisipasi rakyat yang sejati dan besar sangat ditentukan oleh kemandirian mereka sebagai individu maupun sebagai bangsa.

Kedua, kemandirian bangsa Indonesia sangat diperlukan dalam konteks era globalisasi dewasa ini, yang menampilkan suatu corak akulturasi antar bangsa yang tidak seimbang. Hubungan antara negara-negara maju dan negara berkembang masih ditandai oleh polarisasi superior-superior, yang ada giliran berikutnya, membawa akulturasi asimetris (*asymmetrical acculturation*) yaitu bahwa pengaruh negara-negara maju yang dominan dalam bidang ekonomi dan iptek atas negara-negara berkembang juga memasuki bidang-bidang non-ekonomi seperti politik dan budaya.

Proses transformasi budaya acapkali menimbulkan “kekegetan budaya” (*cultural shock*) di kalangan masyarakat yang tidak memiliki kemandirian, atau sedang dalam proses pencarian identitas diri, seperti yang tampak pada sebagian bangsa Indonesia, terutama di kalangan generasi penerus. Responi terhadap pengaruh budaya asing yang tidak kritis, rasional, dan proporsional, umpamanya, lebih menekankan pengambil-alihan budaya (dalam arti terbatas, seni dan mode kehidupan) daripada pengambil-alihan iptek, membawa bangsa Indonesia kehilangan peluang untuk memperoleh keunggulan kompetitif dalam konteks kemajuan bangsa-bangsa lain.

Begitu juga, dalam menghadapi perubahan struktural masyarakat sebagai akibat dari proses pembangunan itu sendiri----dari masyarakat agraris ke masyarakat teknologis ataupun masyarakat informatif----kemandirian masyarakat merupakan syarat

mutlak tanpa kemandirian masyarakat yang bersangkutan perubahan struktural tersebut sukar terjadi.

Sebagai ide sentral dalam strategi pembangunan, kemandirian perlu didefinisikan dengan jelas sehingga memudahkan proses pencapaiannya. Ia tidak cukup didefinisikan dalam rumusan segala “bukan” yang bersifat verbalistik. Lebih penting dari itu penempatan kemandirian dalam sistem kepribadian kepribadian manusia, apakah ia dipandang sebagai sikap mendasar yang melahirkan kecenderungan-kecenderungan psikologis seperti dinamika, prakarsa, kreativitas, dan inovasi, yang kemudian disebut sebagai ciri-ciri dominasi dari kemandirian, ataukah kemandirian itu dipandang sebagai menifestasi dari beberapa kecenderungan psikologis tertentu.

Pada hemat penulis, kemandirian lebih merupakan aktualisasi diri manusia dalam menampilkan eksistensinya sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai kebebasan untuk berkehendak dan berbuat (*free will* dan *free act*) dan bertanggungjawab atas kehendak dan perbuatannya itu.¹ Untuk dapat mengaktualisasikan kemandirian seorang manusia perlu mengembangkan potensi-potensi kerohanian yang intrinsik dalam dirinya yang dapat menggerakkan hidup. Selain beberapa potensi yang telah disebutkan di atas (dinamika, prakarsa, kreativitas, inovasi), potensi lain yang relevan dengan kemandirian adalah kebebasan yang tanggungjawab itu sendiri, disamping kepercayaan diri (konfidensi).

Kendati kemandirian adalah hal kualitatif yang sukar diukur secara kuantitatif, namun kemandirian dapat ditandai dengan beberapa tingkah laku yang berkaitan dengan sikap orientasinya. Dalam hal ini seorang manusia mandiri adalah manusia yang cenderung untuk merealisasikan segala cita, rasa, dan karyanya kedalam karya nyata, dan kemudian senantiasa cenderung untuk meningkatkan karya nyatanya itu menjadi karya terbaik atau prestasi, dalam proses dimensi dan sistematis untuk menghampiri cita-cita (tujuan hidup), sebagai menifestasi dari penghadapan ke masa depan.

Sebagai manusia yang berpancasila, manusia dan masyarakat Indonesia yang mandiri tentu tidak mungkin meninggalkan komitmennya dengan nilai-nilai Ketuhanan,

¹ Free Will atau Free act dalam istilah Arabnya disebut *qadariyah* adalah paham teologi yang menyatakan bahwa manusia punya potensi untuk melakukan perubahan mendasar dalam hal menentukan nasib dirinya. Kebalikannya adalah *predestination* (Arab: *Jabariyah*).

kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keadilan, seperti terkandung dalam falsafah Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, kemandirian yang dikembangkan adalah sebuah “kemandirian tengahan”, yaitu konsep yang menggabungkan antara individualitas dan kolektifitas pada satu sisi, dan antara antropo-centrisme dan teo-centrime pada sisi yang lain.

Berbeda dengan konsep kemandirian yang ditegakkan atas dasar individualisme dan rasionalisme seperti yang berkembang pada masyarakat Barat, yang melahirkan humanisme sekuler yang ateistik, “kemandirian tengahan” menawarkan humanisme religius --- paham kemanusiaan yang bernafaskan Ketuhanan. Dalam prespektif ini, manusia dipandang sebagai subyek kehidupan yang bebas dan bertanggungjawab atas eksistensinya, tapi sebagai makhluk Tuhan ia perlu berhubungan dengan-Nya untuk memperoleh kekuatan-kekuatan rohaniah sehingga manusia akan lebih berkemampuan untuk mengemban fungsinya sebagai subyek kehidupan.

Perwujudan kualitas manusia seperti itu sangat ditentukan oleh corak pembangunan yang dijalankan. Pembangunan dapat dipersepsikan sebagai proses pembaharuan (modernisasi), yang biasanya menekankan pada aspek kehidupan materiil yang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pembangunan juga dapat berarti proses pembebasan (liberasi) manusia dari belenggu kemanusiaanya, seperti kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Dan pembangunan dapat juga mengandung arti proses perhumanisan (humanisasi). Yang terakhir lebih menekankan pembangunan watak dan mentalitas manusia sebagai landasan pembangunan masyarakat secara lebih luas. Yang ideal tentu pembangunan yang tidak hanya berkonotasi modernisasi dan liberasi tapi juga pembangunan yang berdimensi humanisasi.

Sebenarnya hal diatas sudah dicukupi dalam adagium “pembangunan manusia (juga masyarakat) Indonesia seutuhnya”, yakni manusia dan masyarakat yang berkedalaman rohaniah dan ketinggian lahiriah. Kendati konsep ini menolak pandangan dikotomis menyangkut hubungan dimensi rohaniah dan dimensi lahiriah dari kehidupan masyarakat, namun bagaimana integrasi antara keduanya masih memerlukan elaborasi lebih lanjut. Hal ini menuntut pembahasan tentang hubungan antara agama dan pembangunan.

Agama sering dipersepsikan sebagai fenomena transendental.² Persepsi demikian membawa konsekuensi logis bahwa cita-cita ideal dari agama adalah perwujudan sebuah “komunitas politik” (*political community*). Sebagai akibatnya, agama mengalami politisasi, dan interaksi antar berbagai umat beragama terjebak ke dalam interaksi yang berdimensi politis. Dalam hal ini, perjuangan umat beragama akan bersifat sektarian dan dilangsungkan untuk interes dan tujuan kelompok dari pada tujuan agama itu sendiri.

Padahal, disamping sebagai fenomena transendental agama merupakan fenomena sosial, yang sangat terkait dengan latar belakang budaya suatu masyarakat. Bahkan perkembangan agama itu sendiri (dalam arti perkembangan doktrin selama masa turunnya wahyu Tuhan) juga berhubungan dengan situasi dan budaya masyarakat dimana agama tersebut diturunkan. Kendati agama memiliki sifat universal, namun universalitas agama tidak harus berlaku tunggal dan seragam dalam kemajemukan realitas budaya masyarakat manusia dalam perbedaan ruang dan waktu. Tapi universalitas agama mungkin saja melahirkan budaya tertentu.

Dalam kaitanya di atas, cita-cita ideal dari agama lebih bersifat sosial, yaitu terwujudnya “masyarakat beragama” (*religious community*). Dalam pandangan Islam, umpamanya, cita-cita ideal agama ini adalah terwujudnya *religious community* yang disebut dengan *Ummah*. Ummah adalah perspektif sejarah Islam yang mengandung konotasi sosial dan bersifat lintas kultural. Untuk mewujudkan cita-cita sosial demikian, agama (Islam) memerlukan politik, tapi tanpa melalui politisasi (“mempolitikkan”) agama untuk menjadi sebuah ideologi politik.

Sebagai agama yang universal, Islam menolak dikotomi agama bersifat politik, namun hubungan keduanya dalam Islam bersifat simbiotik, yakni bahwa keduanya saling memerlukan: agama memerlukan politik sehingga agama dapat terpelihara, dan politik memerlukan agama sehingga politik itu bermoral. Simbiosisme agama dan politik, dengan demikian, mengandung arti bahwa agama merupakan sumber etika dan moralitas politik. Perjuangan (baca: umat beragama) dalam bidang politik adalah untuk

² Artinya, sebagai seperangkat nilai norma yang dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia, karenanya mengandung model ideal bagi kehidupan umat manusia.

mengalokasikan etika dan moralitas agama tersebut ke dalam prose politik yang ada pada suatu bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa tersebut.

Dalam kaitan ini, agama dapat dijadikan faktor pendamping dan pendukung (komplementer) terhadap proses politik pembangunan. Jika politik pembangunan dilangsungkan atas dasar Pancasila sebagai nilai-nilai dasar (*fundamental values*), maka agama, sebagai nilai-nilai yang hidup berkembang di kalangan masyarakat, dapat difungsikan sebagai nilai-nilai instrumental (*instrumental values*), yakni dengan mengembangkan etika dan moralitas keagamaan untuk dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kualitas manusia yang merupakan pelaku dan pelangsup pembangunan.

Agama, terutama Islam, sangat kaya dengan nilai etika dan moral. Secara konseptual agama membawa paradigma etika dan moral (*hudan linnas*)³ untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian umat manusia (*rahmatan lil 'alamin*). Sejalan dengan cita-cita sosial Islam, yaitu perwujudan *ummah*, maka keberagaman lewat peribadatan dalam Islam mengandung makna jalan atau metode untuk mengembangkan kualitas manusia untuk menghampiri “kualitas paripurna” (*insan kamil* atau manusia seutuhnya). Untuk mencapai kualitas paripurna ini seorang muslim diharapkan mampu mengembangkan “potensi-potensi Ketuhanan” dalam dirinya dengan jalan menginternalisasikan “sifat-sifat Tuhan” (*al-asma al-husna*).

Dalam konteks perkembangan potensi-potensi yang mendukung lahirnya kemandirian, umpamanya, maka beberapa etika keagamaan dapat ditemukan pada *al asma al husna* , seperti nilai penciptaan atau kreativitas (*al-khalik*), nilai inovasi (*al-musshawwir*), nilai kepercayaan diri (*al-qahhar*), dan lain-lain.

Fungsionalisasi agama sebagai sumber motivasi bagi pembangunan membawa implikasi terhadap pendekatan pembangunan terhadap agama. Dalam hal ini, agama tidak hanya dijadikan sebagai “sasaran pembangunan” , yang menampilkan pembangunan aspek fisik dari keberagaman, seperti pembangunan prasarana dan pranata keagamaan, tapi juga dijadikan sebagai “sarana pembangunan” yang menekankan pembangunan aspek non-fisik dari keberagaman, yaitu menciptakan

³ Antara lain disebut dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2:185)

suasana kondusif bagi peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama.

Pembangunan bidang keagamaan, dengan demikian, perlu diarahkan kepada kemungkinan substansi agama bagi kepentingan pembangunan itu sendiri. Pendekatan formalistik terhadap agama akan mengakibatkan pembangunan kehilangan kemungkinan kontribusi positif dan konstruktif agama. Partai politik sebagai agen reformasi dan modernisasi sosial perlu memelopori pendekatan substantifikasi terhadap agama, yakni tidak hanya menjadikan agama sebagai faktor mobilisasi politik tapi sebagai faktor substansiasi politik dalam rangka mengembangkan politik pembangunan berdasarkan Pancasila.